

## PEMIMPIN DAN TANTANGAN PENERAPAN IDEOLOGI PANCASILA DALAM KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN BARU

**R. Rahaditya**

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: [rahaditya@fh.untar.ac.id](mailto:rahaditya@fh.untar.ac.id)

### Abstrak

Pemerintah Indonesia, yang diharapkan dapat menjalankan roda pemerintahan dengan efektif, seharusnya berpegang pada kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila untuk memastikan kebijakan yang diambil dapat mengakomodasi keberagaman, mewujudkan keadilan sosial, dan menciptakan pemerintahan yang inklusif. Penerapan ideologi Pancasila dalam pemerintahan baru seringkali terhambat oleh sejumlah hambatan struktural dan kultural. Salah satunya adalah ketidakpedulian pemimpin terhadap adanya birokrasi yang lambat dan tidak efisien, yang memperlambat pengambilan keputusan serta menyuburkan praktik korupsi. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menilai relevansi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial, serta untuk mengidentifikasi bagaimana nilai-nilai tersebut dapat lebih efektif diimplementasikan dalam kebijakan pemerintahan yang berlandaskan kepemimpinan Pancasila. Metode penulisan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, atau yang dikenal dengan penelitian hukum doktrinal, berdasarkan mazhab positivisme. Hasil pembahasan dari penulisan ini menunjukkan bahwa pemimpin ideal harus mendahulukan kepentingan bersama dan berlandaskan Pancasila, dengan menciptakan pemerintahan yang adil dan bersih. Penerapan Pancasila dalam pemerintahan baru menghadapi tantangan seperti kepentingan politik, birokrasi yang lambat, dan kurangnya pemahaman masyarakat. Dibutuhkan pemimpin dengan visi yang kuat dan berkomitmen untuk bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap kebijakan.

**Kata Kunci:** Pancasila; Pemerintahan baru; Kepemimpinan;

R. Rahaditya

*Pemimpin Dan Tantangan Penerapan Ideologi Pancasila Dalam Kepemimpinan Pemerintahan Baru*

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman seperti etnis, keanekaragaman agama, ras serta golongan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika secara nyata menggambarkan keberagaman budaya bangsa yang bersatu dalam NKRI (Prabandani, 2022). Wilayah Indonesia yang luas, dari Sabang hingga Merauke, tidak hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga memiliki aset sosial dengan berbagai corak yang berbeda. Sebagai negara yang sangat beragam, Indonesia memerlukan suatu kekuatan yang dapat menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat. Kekuatan tersebut terwujud dalam konsep filsafat yang dikenal dengan nama Pancasila. Pancasila menjadi titik temu bersama dan dasar pemersatu bagi seluruh bangsa Indonesia. Syamsudin, yang mengutip istilah ini dari Al-Qur'an, menyatakan bahwa Pancasila bisa dipahami sebagai *kalimatun sawa* atau satu kata yang menyatukan Indonesia yang penuh perbedaan. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya penjelasan politik, tetapi juga sebuah artikulasi ideologis. Sebagai artikulasi politik, Pancasila berperan dalam menyatukan beragam pandangan dan aliran politik yang ada. (Prabandani, 2022).

Terdapat fenomena ketimpangan yang semakin terasa dalam pemerintahan yang menghadapi tantangan besar untuk menyeimbangkan antara modernisasi dan identitas kebangsaan yang berlandaskan Pancasila. Era globalisasi yang semakin pesat turut membawa pengaruh asing yang sering kali mereduksi nilai-nilai lokal, termasuk Pancasila, dan menuntut Indonesia untuk mengadaptasi kebijakan dan sistem hukum yang sesuai dengan standar

internasional. Akan tetapi, meskipun pengaruh global sangat kuat, Pancasila seharusnya tetap menjadi dasar yang kokoh untuk semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah Indonesia, yang diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik, seharusnya berpegang pada nilai-nilai Pancasila untuk memastikan kebijakan yang diambil mampu mengakomodasi keberagaman, mewujudkan keadilan sosial, dan menciptakan pemerintahan yang inklusif.

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pemerintahan sering kali terhambat oleh sejumlah hambatan struktural dan kultural. Salah satunya adalah adanya birokrasi yang lambat dan tidak efisien, yang memperlambat pengambilan keputusan serta menyuburkan praktik kolusi dan korupsi. Hal ini mengakibatkan kebijakan yang seharusnya mencerminkan nilai keadilan sosial tidak dapat terlaksana dengan baik, Akibat ketimpangan sosial dan ekonomi yang semakin melebar, tantangan lain yang muncul adalah rendahnya pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini merujuk pada tujuan untuk menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila, khususnya di kalangan generasi muda yang lebih banyak terpapar oleh nilai-nilai global yang sering kali bertentangan dengan nilai-nilai lokal Pancasila. Selanjutnya fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam sistem pemerintahan Indonesia yang sedang mengalami berbagai perubahan.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai relevansi nilai-nilai utama dalam Pancasila, seperti kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial, dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berkembang tersebut secara lebih efektif dalam kebijakan pemerintahan yang berlandaskan pada kepemimpinan Pancasila. Diharapkan melalui penelitian ini, dapat ditemukan solusi untuk memperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan kepemimpinan yang lebih baik dan berkelanjutan, serta untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial yang timbul akibat ketimpangan dan ketidakadilan di masyarakat (Ilham Khair et al., 2024).

Manfaat dari penelitian ini sangat signifikan secara teoritis atau pun praktis. Secara metode teoritis, diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan pemimpin, khususnya dalam kajian tentang kepemimpinan berbasis nilai-nilai Pancasila dan penerapannya dalam pemerintahan. Penelitian ini juga akan memperkaya perspektif tentang bagaimana Pancasila sebagai dasar negara dapat tetap relevan di tengah tantangan globalisasi dan perubahan zaman. Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pembuat kebijakan, pemimpin dalam meningkatkan pemahaman mereka terhadap pentingnya menghidupkan nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk memperbaiki kebijakan yang lebih adil dan lebih *inklusif*, serta menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menilai kondisi terkini terkait dengan penerapan Pancasila dalam pemerintahan baru, tetapi juga untuk memberikan solusi praktis guna mengoptimalkan peran Pancasila dalam menciptakan kepemimpinan masyarakat yang lebih sejahtera, harmonis, dan adil. Pancasila sebagai ideologi negara harus dapat dipahami, dihargai, dan diterapkan (*real in action*) dengan penuh kesadaran oleh setiap elemen masyarakat, terutama oleh para pemimpin yang memegang peranan penting dalam menentukan arah kebijakan negara.

## METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum normatif (penelitian hukum doktrinal) berdasarkan mazhab positivisme (*legal positivism*). Objek penelitian berfokus pada hukum yang dipahami sebagai kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan mengumpulkan peraturan yang berkaitan dengan Pancasila serta isu hukum yang relevan, serta sumber-sumber seperti buku dan jurnal. Teknik analisis data yang digunakan

adalah analisis kualitatif bersifat preskriptif, dimana peneliti memberikan argumentasi atas hasil penelitian. Argumentasi yang dihasilkan akan mengkaji bagaimana seharusnya kepemimpinan yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila, serta bagaimana nilai-nilai tersebut seharusnya diterapkan dalam konteks kepemimpinan di Indonesia (SH..M.Hum, 2015) .

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Pemimpin Berlandaskan Nilai-Nilai Ideologi Pancasila***

Para pemimpin adalah orang-orang yang pertama kali bergerak menuju ke suatu wilayah tak dikenal. Mereka bergegas ke tempat berbahaya, Mereka mengesampingkan kepentingan pribadi demi melindungi kita dan membawa kita ke masa depan. Seorang pemimpin lebih dulu mengorbankan apa yang dimilikinya untuk menyelamatkan apa yang dimiliki oleh orang lain, inilah esensi dari kepemimpinan. Pemimpin memilih untuk bergerak pertama kali ke dalam bahaya, menuju tempat yang belum diketahui, karena masyarakat meyakini bahwa pemimpin akan melindungi mereka dan akan berada di belakang mereka. Pemimpin bekerja tanpa kenal lelah untuk mewujudkan visi mereka dan dengan bangga menyebut diri mereka sebagai pelindung yang bekerja demi kebaikan bersama dirinya sebagai pengikut mereka, ini yang merupakan pada karakteristik pemimpin itu sendiri. Pemimpin harus mempunyai rasa saling percaya diantara para anggotanya, mempertahankan fokus pada hal yang terpenting memahami betapa penting orang-orang dan hubungan bagi kesuksesan misi, bagi beberapa organisasi, kegagalan bisa melahirkan bencana, namun sebagai karakteristik pemimpin kegagalan bukanlah pilihan, maka dari itu tak diragukan lagi, anggota militer menyanggupi tercapainya kesuksesan di instansi mereka (Sinek, 2020).

Pemimpin merupakan agen perubahan, terutama karena birokrasi di Indonesia telah lama mendapat kritik tajam, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Seorang pemimpin seharusnya tidak dikaitkan dengan kelambanan, prosedur yang bertele-tele, atau praktik korupsi. Banyak kritik yang mengarah pada pemimpin yang dianggap cenderung menuju kehancuran akibat masalah-masalah tersebut. Oleh karena itu, ada beberapa hal penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, agar dapat mengatasi tantangan tersebut dan membawa perubahan yang positif :

1. Seorang pionir harus memiliki keyakinan bahwa dirinya mampu menjadi penggerak dan pemantik dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Harus yakin dalam memahami masalah yang dihadapi. Mampu mengatasi masalah dan melakukan perubahan.

2. Terus menerus memberi contoh bagi bawahan. Teladan juga berarti harus teguh dan bersedia bertaubat untuk yang lebih besar, contoh ini harus datang dari dalam diri pionir.
3. Pionir bekerja lebih keras daripada bawahan. Bekerja sepenuh hati, salah satu hal yang harus dilakukan adalah memberdayakan diri untuk terus menerus keluar dari zona penghiburan (*consolation zone*), bekerja dalam zona persaingan (*competitive zone*). Sebab, pionir yang bekerja keras dalam zona persaingan tentu akan terus menerus menciptakan inovasi dan kegiatan-kegiatan hebat yang mengasah pendekatan, atau menghasilkan sesuatu yang modern dan menjawab kebutuhan.
4. Pionir yang berada dalam posisi untuk berubah selalu dapat diandalkan dalam melakukan segala hal hebat. Tetaplah bersemangat untuk melakukannya di awal, tengah, dan akhir proses. (Prasojo & Dkk., 2013).

Seorang pemimpin harus memiliki niat yang kuat dan keyakinan bahwa ia mampu melakukan yang terbaik, meskipun di masa lalu belum memiliki rekam jejak (*track record*) yang sempurna. Kepemimpinan sejati tidak diukur dari seberapa buruk seseorang di masa lalu, tetapi seberapa baik ia dalam menyelesaikan pekerjaan, mengatasi masalah, berinteraksi dengan orang lain, dan memberikan solusi yang efektif terhadap berbagai problem yang terjadi.

Di Indonesia, penyelenggara negara diharuskan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam peran mereka, bertindak sebagai pelopor dalam proses tersebut. Nilai-nilai tersebut—seperti Ketuhanan, kemanusiaan, kasih sayang, cinta tanah air, hukum, dan keadilan sosial—tercermin dalam lima sila Pancasila. Penyelenggara negara yang berpedoman pada Pancasila seharusnya menyelaraskan tindakannya dengan prinsip-prinsip tersebut. Pemimpin yang mengikuti Pancasila akan mampu mengelola nilai-nilai ini dengan efektif, menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan memimpin bangsa menuju masa depan yang lebih bermartabat dan sejahtera. Pancasila, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, memenuhi syarat sebagai filosofi negara karena mencakup ajaran, prinsip, teori, dan norma-norma yang diterima secara luas sebagai kebenaran dan disusun secara sistematis untuk diterapkan dalam kehidupan nyata. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara sangat erat kaitannya dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, terutama dalam melawan penjajahan dan membangun negara yang merdeka serta mandiri. Sistem keyakinan yang terkandung dalam Pancasila telah bertahan melalui berbagai tantangan, mengalami masa-masa kemunduran dan kebangkitan. Namun, sejak awal era reformasi pada tahun 1998, terdapat penurunan yang signifikan, yang tercermin dalam penurunan pemerintahan yang efektif, sebagaimana terlihat dari kegagalan dalam memprioritaskan kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyat di Indonesia (AR & Tim Poltracking, 2014).

Seorang pemimpin yang ber-Pancasila bukan hanya mereka yang hafal isi Pancasila, tetapi lebih dari itu, Pancasila harus memberikan dampak positif bagi dirinya sendiri dan lingkungan sekitar. Nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan dalam bentuk tindakan dan kegiatan nyata, seperti menjaga perbedaan, memiliki ketangguhan, tidak bersikap rasis, serta yang terpenting, memiliki sikap anti-korupsi dan komitmen untuk memberantas keburukan. Pemimpin yang ber-Pancasila adalah seorang negarawan yang senantiasa menegakkan dan menjabarkan nilai-nilai serta norma-norma Pancasila dalam setiap aspek kehidupannya. Pemimpin yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia saat ini adalah pemimpin yang mampu mengasah dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi teladan dan contoh yang baik bagi rakyatnya. Pemimpin yang dimaksud adalah seorang pemimpin yang berwawasan Pancasila, yang menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan hidup. Seorang individu tidak cukup hanya

memiliki wawasan intelektual untuk menjadi berkualitas, tetapi juga membutuhkan wawasan spiritual untuk membentuk karakter dan integritas yang sejati. (Prabandani, 2022).

Konsep kepemimpinan yang berjiwa Pancasila merujuk pada kepemimpinan pemerintahan yang berkarakter dan berlandaskan pada prinsip-prinsip Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut meliputi nilai

Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Kepemimpinan Pancasila bertujuan untuk menciptakan kepemimpinan yang inklusif, adil, bertanggung jawab, dan berfokus pada kesejahteraan serta kemajuan bangsa Indonesia secara menyeluruh. Dengan demikian, kepemimpinan ini tidak hanya memperhatikan kepentingan sebagian pihak, tetapi berkomitmen untuk membawa kemaslahatan bagi seluruh rakyat dan negara. Pada organisasi yang mengharapkan dapat memperoleh kemajuan dalam aspek atau bidang usahanya, maka suatu kepemimpinan yang baik merupakan hal yang mutlak diperlukan oleh organisasi dimaksud, terutama dalam hal keahlian pada bidang tersebut, hal ini dimaksudkan agar dapat menghindarkan dari keputusan-keputusan yang bersifat spekulatif, sehingga pada akhirnya mampu diputuskan dengan lebih terarah, kemudian terhindar dari pengambilan keputusan yang terburu-buru dan menggunakan tenaga kerja serta alat produksi yang dimiliki organisasi secara berdaya guna serta berhasilguna. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu membangun nilai dan norma bersama kelompok yang dia pimpin, menciptakan kesepahaman dan keharmonisan di antara anggotanya. Pemimpin seperti ini tidak hanya memimpin dengan otoritas, tetapi juga dengan keterlibatan aktif dalam mengembangkan budaya bersama yang positif, yang mendasari setiap langkah dan keputusan dalam kelompok tersebut. Dengan begitu, pemimpin mampu memberikan arah yang jelas dan menjadi teladan bagi kelompok yang dipimpinnya (Ilham Khair et al., 2024).

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dimulai dengan pemahaman bahwa nilai-nilai tersebut adalah nilai intrinsik yang kebenarannya dapat dibuktikan secara objektif. Nilai-nilai Pancasila mengandung kebenaran yang bersifat universal dan mutlak, yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks kehidupan. Adapun makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila adalah sebagai berikut:

#### 1. Ketuhanan (Religiusitas)

Sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai Ketuhanan mempunyai makna yaitu bangsa Indonesia berhak untuk menganut dan memiliki serta menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif antar umat beragama. Juga mengandung arti adanya pengakuan bangsa Indonesia terhadap adanya Tuhan pencipta alam semesta. Dengan nilai ini bangsa Indonesia dinyatakan sebagai bangsa yang religius bukan bangsa atheis. Negara Indonesia juga melindungi kemerdekaan bagi setiap penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing serta untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Nilai religius merupakan nilai yang erat kaitannya dengan sesuatu kekuatan suci, agung, sakral, dan mulia. Ketuhanan sebagai pandangan hidup adalah mewujudkan serta membangun masyarakat Indonesia untuk memiliki jiwa dan semangat dalam mencapai ridho Tuhan dalam setiap perbuatan baik yang dilakukannya

#### 2. Kemanusiaan (Moralitas)

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mempunyai pengertian yaitu kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai moral dalam kehidupan sehari-hari atas dasar tuntutan hati nurani. Setiap manusia memiliki potensi menjadi manusia yang sempurna, yaitu manusia yang beradab. Manusia yang maju peradabannya pasti akan lebih mudah menerima kebenaran dengan mengikuti tata cara dan pola kehidupan masyarakat yang teratur, serta mengenal hukum yang universal. Kesadaran inilah yang menjadikan semangat dalam membangun kehidupan masyarakat dan alam semesta untuk mencapai kebahagiaan dengan usaha yang gigih, dan diimplementasikan dalam bentuk sikap yang harmoni, toleransi dan penuh kedamaian. Makna pengakuan terhadap persamaan derajat antar manusia bahwa

setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban pada sikap moral dan tingkah laku yang didasarkan pada potensi hati nurani, Serta dalam hubungannya dengan nilai pada norma – norma dan kebudayaan pada masyarakat setempat.

3. Persatuan Indonesia (Kebangsaan)

Persatuan merujuk pada penyatuan berbagai bagian. Persatuan Indonesia adalah upaya untuk melihat diri sendiri secara lebih objektif dalam kaitannya dengan dunia. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk melalui perjuangan sejarah yang panjang dan terdiri dari berbagai suku bangsa. Namun, perbedaan-perbedaan ini tidak untuk dipertentangkan, melainkan dirayakan sebagai dasar dari persatuan Indonesia. Nilai Persatuan Indonesia menekankan pentingnya menyatukan rakyat untuk membangun rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan ini menghormati dan sepenuhnya mengakui keberagaman bangsa Indonesia. Setiap warga negara Indonesia diharapkan untuk mengembangkan rasa cinta tanah air dan bersedia berkorban demi kepentingan bangsa dan negara jika diperlukan.

4. Musyawarah dan Perwakilan

Sebagai makhluk sosial, manusia hidup berdampingan dengan satu sama lain, di mana interaksi seringkali menghasilkan kesepakatan dan saling menghormati untuk mencapai tujuan dan kepentingan bersama. Prinsip demokrasi, yang merupakan cita-cita utama bangsa Indonesia, adalah demokrasi yang mampu mengendalikan diri dan teguh dalam mempertahankan nilai-nilai, meskipun menghadapi tantangan besar untuk menciptakan perubahan dan pembaruan. Kearifan lokal mencerminkan pemikiran tinggi bangsa, menghindari pemikiran sempit yang terperangkap dalam kelompok atau aliran pemikiran tertentu. Penyelenggaraan negara di Indonesia berdasarkan pada prinsip musyawarah dan perwakilan. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara demokratis yang mengakui dan menghormati kedaulatan rakyat, dengan mengutamakan musyawarah yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Rakyat Indonesia wajib menghormati dan menjunjung setiap keputusan yang diambil melalui musyawarah, dengan niat baik dan rasa tanggung jawab yang besar.

5. Keadilan sosial

Nilai keadilan melibatkan penghormatan terhadap norma-norma yang berlandaskan prinsip netralitas, keseimbangan, dan kesetaraan dalam segala aspek kehidupan. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah cita-cita bangsa ini. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan masyarakat yang bersatu dalam keharmonisan, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, berkembang, dan menjalani kehidupan sesuai dengan potensi dan kemampuannya. Semua upaya diarahkan untuk menggali potensi rakyat, membentuk karakter, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sehingga kesejahteraan dapat tercapai secara adil dan merata (Fitriano, 2022). Meskipun istilah Pancasila tidak secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Dasar, hal ini harus menjadi perhatian pemerintah. Pancasila sebagai dokumen hidup yang terus berkembang dalam masyarakat perlu terus dihidupkan dan dipopulerkan sebagai dasar negara serta sumber dari segala hukum. Penting untuk memperkuat penerapan Pancasila dalam kerangka supremasi hukum dan dalam upaya membangun sistem hukum nasional yang lebih baik. Meskipun Pancasila diakui sebagai dasar negara dan sumber hukum, istilah ini tidak secara langsung tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945. Sebagai sumber hukum, Pancasila tercermin dalam pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 dan hubungan antar lembaga, terutama dalam Pasal 1 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat di bawah pemerintahan nasional. Sebelum amandemen UUD 1945, rumusan Pancasila sebagai sumber hukum dapat ditemukan dalam Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 yang mengatur sumber hukum negara. Setelah amandemen, istilah Pancasila dijadikan dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 mengenai pelaksanaan ketentuan undang-undang tersebut.

### ***Tantangan Nilai Pancasila Pada Pemerintahan Baru***

Fokus pada tantangan yang muncul saat nilai Pancasila diterapkan dalam kebijakan dan pemerintahan terletak pada kesenjangan antara prinsip-prinsip ideal dan implementasi nyata di lapangan. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana memastikan nilai-nilai seperti keadilan sosial dan persatuan benar-benar tercermin dalam kebijakan publik, sementara di sisi lain, kepentingan politik, ekonomi, dan golongan tertentu sering kali mendominasi pengambilan Keputusan (Bo', 2017). Selain itu, kebijakan yang dibuat sering kali hanya bersifat simbolis tanpa diiringi komitmen nyata untuk memberdayakan masyarakat. Misalnya, program-program kesejahteraan yang tidak merata atau cenderung diskriminatif menunjukkan adanya tantangan dalam menerapkan prinsip keadilan yang beradab. Dalam konteks pemerintahan, muncul pula masalah birokrasi yang lambat dan korupsi yang bertentangan dengan semangat ketuhanan dan kemanusiaan yang diusung oleh Pancasila. Tantangan lain adalah mengintegrasikan nilai musyawarah dalam proses pengambilan keputusan di era modern yang cenderung serba cepat dan individualistis. Dalam banyak kasus, musyawarah sering kali hanya menjadi formalitas, tanpa melibatkan semua pihak secara mendalam atau memperhatikan kebutuhan kelompok yang lebih kecil dan rentan. Ini berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menggerus semangat gotong royong. Tak kalah penting, tantangan besar juga muncul dalam menjaga nilai persatuan di tengah keberagaman budaya, agama, dan pandangan politik. Polarisasi yang semakin tajam di masyarakat, terutama akibat pengaruh media sosial dan informasi yang tidak akurat, membuat pemerintah harus bekerja keras untuk menciptakan kebijakan yang inklusif tanpa memihak pada kelompok tertentu. Jika nilai Pancasila tidak ditegaskan sebagai pedoman utama, ada risiko perpecahan yang dapat merusak stabilitas sosial dan politik.

Dalam konteks globalisasi, pemerintahan juga menghadapi dilema antara mengikuti perkembangan internasional dan menjaga identitas bangsa yang berlandaskan Pancasila. Pengaruh budaya asing, tekanan ekonomi global, dan perubahan teknologi menuntut pemerintah untuk tetap relevan tanpa kehilangan jati diri bangsa (Asiva Noor Rachmayani, 2015). Hal ini membutuhkan kebijakan yang inovatif tetapi tetap berakar pada nilai-nilai kebangsaan yang kokoh. Tantangan-tantangan tersebut membutuhkan komitmen dan konsistensi dari pemerintah untuk tidak hanya menjadikan Pancasila sebagai dasar hukum, tetapi juga sebagai panduan moral dan etika dalam setiap langkah yang diambil.

Hambatan pemimpin untuk mewujudkan Pancasila dalam kebijakan dan struktur pemerintahan yang baru seringkali bermula dari konflik kepentingan yang terjadi di antara berbagai pihak. Dalam sistem pemerintahan, kepentingan politik, ekonomi, dan golongan tertentu sering mendominasi, sehingga nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, persatuan, dan musyawarah menjadi sulit untuk diwujudkan secara menyeluruh (JA et al., 2017). Selain itu, birokrasi yang kompleks dan lambat sering kali menjadi penghalang utama dalam implementasi kebijakan yang berpihak pada nilai-nilai Pancasila. Pemimpin yang memiliki visi untuk menerapkan nilai Pancasila seringkali dihadapkan pada tantangan teknis, seperti kurangnya dukungan dari aparat pemerintah yang tidak memahami atau tidak memiliki komitmen terhadap nilai-nilai tersebut. Hal ini diperparah oleh korupsi yang masih mengakar di berbagai level pemerintahan, yang secara langsung bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran yang diusung oleh Pancasila (Hidayat, 2017).

Di sisi lain, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila juga menjadi hambatan yang signifikan. Ketika masyarakat tidak melihat Pancasila sebagai panduan moral dalam kehidupan sehari-hari, upaya pemimpin untuk menjadikannya sebagai dasar kebijakan sering kali tidak mendapat dukungan penuh. Ini menciptakan celah antara pemimpin dan rakyat, yang pada akhirnya memperlambat proses perubahan. Pemimpin juga harus berhadapan dengan tantangan globalisasi, yang membawa berbagai pengaruh asing ke dalam negeri. Tantangan ini sering kali membuat nilai-nilai lokal, termasuk Pancasila, terpinggirkan oleh kebutuhan untuk bersaing di kancah internasional. Dalam situasi ini, pemimpin

dituntut untuk menjaga keseimbangan antara adaptasi terhadap perubahan global dan pelestarian nilai-nilai kebangsaan (Bambang Wisudo, 2021).

Hambatan lain yang tak kalah penting adalah kurangnya pendidikan yang memadai mengenai Pancasila di kalangan generasi muda. Ketika generasi penerus tidak memahami atau tidak menghayati nilai-nilai Pancasila, maka upaya pemimpin untuk membangun kebijakan yang berakar pada ideologi bangsa menjadi semakin sulit. Ini menuntut adanya perbaikan dalam sistem pendidikan yang mampu menanamkan nilai-nilai Pancasila secara mendalam dan aplikatif (Sulaiman, 2015). Dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut, pemimpin membutuhkan visi yang jelas, keberanian untuk mengambil keputusan yang sulit, dan

kemampuan untuk mempersatukan berbagai pihak dalam semangat gotong royong. Tanpa kualitas ini, mewujudkan Pancasila sebagai landasan kebijakan dan struktur pemerintahan yang baru hanya akan menjadi cita-cita tanpa realisasi yang nyata.

## **KESIMPULAN**

Pemimpin yang ideal adalah sosok yang mendahulukan kepentingan bersama, menunjukkan dedikasi, tanggung jawab, dan memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dengan keyakinan yang dimilikinya. Dalam konteks Indonesia, kepemimpinan ini harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila mengajarkan pentingnya menjunjung tinggi nilai Ketuhanan, menghargai kemanusiaan, menjaga persatuan, menerapkan prinsip musyawarah, serta mewujudkan keadilan sosial. Pemimpin yang berbasis Pancasila tidak hanya menghormati keberagaman, namun juga mendorong inklusivitas dan toleransi di tengah masyarakat yang majemuk. Mereka harus mampu menjauhkan diri dari korupsi, menciptakan pemerintahan yang bersih, serta mengambil kebijakan yang adil dan berpihak pada rakyat. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman, pemimpin dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan harmonis sesuai dengan cita-cita bangsa.

Penerapan nilai Pancasila dalam pemerintahan baru menghadapi tantangan besar, seperti dominasi kepentingan politik dan ekonomi, birokrasi lambat, serta kolusi dan korupsi yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Musyawarah sering kali hanya menjadi formalitas, dan polarisasi sosial serta pengaruh globalisasi menambah kesulitan dalam menjaga persatuan. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Pancasila memperburuk kondisi ini. Untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap kebijakan, diperlukan pemimpin dengan visi kuat, berkomitmen menerapkan nilai-nilai Pancasila.

## **SARAN**

Pemimpin yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila harus memiliki keyakinan yang kuat untuk menjadi penggerak perubahan, memberi keteladanan, bekerja keras, dan berfokus pada perubahan yang berkelanjutan (*sustainable*). Pemimpin tidak hanya sebatas memahami sila-sila Pancasila, tetapi yang terpenting adalah bisa menghayati dan mengimplementasikan sila-sila tersebut dalam setiap tindakannya sehari-hari, seperti mengedepankan kebhinekaan, toleransi, dan berkomitmen terhadap anti-korupsi dan kolusi. Kepemimpinan berbasis Pancasila juga menekankan pada nilai spiritualitas, moralitas, kebangsaan, demokrasi, dan keadilan sosial sebagai prinsip dasar yang harus diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi negara harus terus hidup dalam masyarakat dan terus dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan hukum. Pemimpin yang bijak dan berkarakter Pancasila akan membawa bangsa Indonesia menuju kemajuan yang adil dan makmur secara berkelanjutan.



Pemerintah perlu mewujudkan nilai Pancasila secara nyata dalam kebijakan, bukan hanya simbolis. Kebijakan yang adil, inklusif, dan mengedepankan musyawarah harus diutamakan, dengan memperbaiki birokrasi dan mengatasi korupsi. Pendidikan Pancasila untuk generasi muda juga harus diperkuat, agar mereka memahami nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah globalisasi, pemerintah harus menjaga keseimbangan antara adaptasi dengan dunia internasional dan pelestarian identitas bangsa. Pemimpin yang visioner dan mampu mempersatukan berbagai pihak sangat diperlukan untuk mewujudkan Pancasila dalam kebijakan dan kehidupan nyata.

### **DAFTAR PUSTAKA Jurnal**

- Fitriono, R. . (2022). Implementasi Nilai - Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-Hari. *Jurnal Gema Keadilan*, 9(November), 1–12.
- Ilham Khair, O., Prima Firmansyah, J., Salman, A., & Susilo Raharjo, J. (2024). Kepemimpinan Nasional yang Berjiwa Pancasila: Investasi Masa Depan Bangsa. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2024(1), 695–703.
- Prabandani, H. W. (2022). Menelusuri kedudukan pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. *Iblam Law Review*, 2(1Wahanu Prabandani, Hendra. "Menelusuri Kedudukan Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum." *Iblam Law Review* 2, 1 (2022): 158–80.

### **Buku**

- AR, H. Y., & Tim Poltracking. (2014). *Jejak Para Pemimpin*.
- Asiva Noor Rachmayani. (2015). *Tantangan Orde Baru Distorsi Ideologi Pancasila*.
- Bambang Wisudo, D. (2021). *Pancasila Yang Mencerdaskan*.
- Bo', F. Y. (2017). *Pancasila Dalam Sistem Hukum (Edisi Baru)*.
- Hidayat, F. (2017). Pancasila: Perspektif Pendiri RI Dan Problematikannya. *In Pancasila*.
- JA, D., Gerung, R., Wibisono, C., Munhanif, A., Sirry, M., Sahal, A., HT, A., Taliwang, H., Pahdepie, F., Hunneman, T., Jian, Z. W., Simon, S., Arismunandar, S., Jonminofri, Rahardjo, J., Bakry, U. S., Hendrajit, & Chalifah, G. (2017). *Mewacanakan Kembali Demokrasi Pancasila yang Diperbarui: Sebuah Polemik*.
- Prasojo, E., & Dkk. (2013). *Pemimpin & Reformasi Birokrasi Catatan Inspiratif dan Alat Ukur Kepemimpinan Dalam Implementasi Reformasi Birokrasi*.
- SH..M.Hum, D. M. (2015). *Metode Penelitian Hukum*.
- Sinek, S. (2020). *Leaders Eat Last: Cara Pemimpin Sejati Menginspirasi Loyalitas, Kerja Sama, dan Keberhasilan*.
- Sulaiman, A. (2015). *Pancasila dan Kewarganegaraan. In Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945